

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 16

Kantin Sekolah jadi Sumber PAD Baru

SEMARANG - Pemprov Jateng menyasar kantin-kanin sekolah (SMA/SMK) sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru. Pada tahun 2019 ini, kantin sekolah ditarget menyumbang pendapatan Rp 1,27 miliar.

Kantin yang dibebani PAD merupakan kantin yang telah ditata dengan layak, menggunakan fasilitas air dan listrik dari sekolah. Jumlah kantin yang terdata sebanyak 1.270, yakni 883 kantin di SMA dan 387 kantin di SMK.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng Sulistyio menjelaskan kebijakan tersebut sudah dilaksanakan pada pertengahan 2018. Namun ia menegaskan jika kantin yang ditarik retribusi bukanlah kantin kecil yang dikelola pembantu kebersihan sekolah atau siswa untuk pembelajaran seperti di SMK.

Untuk nominal retribusi, lanjut Sulistyio, Rp 100 ribu per bulan. "Sebulan Rp 100 ribu. Satu tahun dihitung 10 bulan," kata Sulistyio, Rabu (30/1).

Tidak dihitung 12 bulan penuh tapi dihitung 10 bulan karena tidak setiap hari sekolah masuk. Ada yang seminggu lima hari sekolah. Dengan kalkulasi tersebut, maka per bulan Pemprov akan memperoleh pendapatan dari kantin sekolah sebesar Rp 127 juta dan Rp 1,27 miliar dalam setahun.

Untuk metode penarikan ret-

ribusi tidak setiap bulan karena merepotkan. Ditarik secara kolektif setiap tiga bulan. "Tidak memberatkan. Daripada kalau tidak setor PAD nanti jadi masalah. Karena menggunakan fasilitas negara (air dan listrik) dan dirawat oleh negara," kata Sulistyio.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng Tavip Supriyanto mengatakan penarikan PAD kantin sekolah berdasarkan Pergub. Hal itu sesuai kewenangan Pemprov Jateng yang mulai tahun 2017 mengelola SMA dan SMK negeri.

Terkait nominal dan teknis, lanjut Tavip, *leading sector* ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. "Sudah ada Pergub yang mengatur. Tapi, *leading sector* bukan di kami tapi di Dinas Pendidikan," ujar Tavip yang baru menjabat Kepala BPPD Jateng per 25 Januari lalu.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Sri Ruwiyati mengungkapkan, kantin sekolah merupakan salah satu aset Pemprov Jateng yang memiliki potensi mendatangkan PAD. Namun demikian pembebanan tersebut diharapkan tidak menjadi penghambat bagi jalannya pendidikan.

"Pemprov Jateng selama ini mengandalkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Saat ini kita menggali potensi pendapatan dari pemanfaatan aset yang kita miliki," ungkapnya. (H81-23)